

SINERGI DIGITALISASI SPMI DAN KAPABILITAS DOSEN: STRATEGI TRANSFORMASI BUDAYA MUTU DI PERGURUAN TINGGI SWASTA

Andi Fika Widuri

Universitas Islam Bandung
E-mail: fikandi7@gmail.com

ABSTRACT

Higher education in Indonesia is currently undergoing a paradigm shift from administrative compliance to the development of a sustainable quality culture. This study analyzes the synergy between the digitalization of the Internal Quality Assurance System (e-SPMI) and the enhancement of lecturer capabilities as the primary pillars of quality culture transformation in Private Higher Education Institutions (PTS). Utilizing a systematic literature review of the latest regulations, including Permendikbudristek No. 53 of 2023 and Permendikisaintek No. 39 of 2025, the research explores how information technology can revolutionize the PPEPP cycle (Setting, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement). The findings indicate that digitalization through e-SPMI facilitates data-driven decision-making; however, its success heavily depends on technology acceptance by lecturers—grounded in the Technology Acceptance Model (TAM)—and transformative leadership support. Despite financial constraints in PTS, lecturer reskilling strategies focusing on digital literacy and intrinsic quality values serve as a crucial mitigation for institutional excellence. This report recommends a systemic integration of user-friendly technology and quality-based incentive policies to achieve high-tier accreditation in the era of disruption.

Keywords: *Quality Culture; Digital Transformation; Higher Education Quality; Private University Management; e-SPMI.*

ABSTRAK

Pendidikan tinggi di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma dari manajemen berbasis kepatuhan administratif menuju pengembangan budaya mutu yang berkelanjutan. Laporan ini menganalisis secara mendalam urgensi sinergi antara digitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (e-SPMI) dan peningkatan kapabilitas dosen sebagai pilar utama transformasi budaya mutu di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dan analisis kontekstual terhadap regulasi terbaru, termasuk Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025, kajian ini mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi dapat merevolusi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Temuan utama menunjukkan bahwa digitalisasi melalui e-SPMI mampu memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), namun keberhasilannya sangat bergantung pada penerimaan teknologi oleh dosen (berdasarkan *Technology Acceptance Model*) dan dukungan kepemimpinan transformatif. Tantangan finansial yang dihadapi PTS sering kali menjadi hambatan dalam investasi infrastruktur digital, namun strategi reskilling dosen yang berfokus pada literasi digital dan nilai-nilai intrinsik mutu dapat menjadi solusi mitigasi. Laporan ini merekomendasikan integrasi sistemik antara pengembangan teknologi yang ramah pengguna, kebijakan insentif berbasis capaian mutu, dan penguatan kemitraan eksternal untuk mencapai akreditasi unggul di era disrupsi.

Kata Kunci: Kualitas Budaya; Transformasi Digital; Kualitas Pendidikan Tinggi; Manajemen PTS; e-SPMI

PENDAHULUAN

Dinamika pendidikan tinggi di Indonesia pada dekade ketiga abad ke-21 ditandai dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan standarisasi mutu yang semakin ketat. Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang memikul beban signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan populasi mahasiswa yang besar, berada dalam posisi yang unik sekaligus menantang. Di satu sisi, PTS harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai ambang batas minimal legalitas, namun di sisi lain, mereka harus bersaing dalam ekosistem global yang menuntut diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai instrumen kunci untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.

Namun, implementasi SPMI di banyak PTS masih sering terjebak dalam jebakan birokrasi kertas. Proses dokumentasi manual yang ekstensif sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam evaluasi dan hilangnya objektivitas data. Penjaminan mutu sering dipandang oleh sivitas akademika, terutama dosen, sebagai beban administratif tambahan daripada sebagai mekanisme peningkatan kualitas yang bermakna. Inilah yang melahirkan konsep kepatuhan administratif (*administrative compliance*) di mana fokus utama adalah pemenuhan dokumen demi akreditasi, sementara substansi perbaikan mutu di ruang kelas sering terabaikan.

Digitalisasi penjaminan mutu melalui sistem e-SPMI menawarkan jalan keluar untuk mentransformasi tata kelola institusi menjadi lebih efisien dan transparan. Melalui e-SPMI, pengumpulan data luaran tri dharma dapat dilakukan secara *real-time*, memungkinkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran berdasarkan data aktual (*data-driven decision making*). Meskipun demikian, teknologi hanyalah infrastruktur pasif jika tidak didukung oleh kapabilitas manusia yang menjalankannya. Dosen adalah motor penggerak utama dalam substansi mutu; merekalah yang merancang kurikulum, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penelitian yang menjadi indikator kinerja utama perguruan tinggi.

Kesenjangan antara kecanggihan sistem digital dan kesiapan mental serta teknis dosen menciptakan fenomena resistensi akademik. Tanpa adanya sinergi antara digitalisasi dan pengembangan kapabilitas dosen, investasi besar dalam teknologi informasi hanya akan menghasilkan sistem yang kosong dan tidak digunakan. Oleh karena itu, strategi transformasi budaya mutu di PTS harus dilakukan secara holistik, menyatukan pembaruan teknologi dengan pemberdayaan sumber daya manusia melalui program reskilling yang terencana. Laporan ini akan mengupas tuntas bagaimana sinergi tersebut dapat dibangun di tengah keterbatasan sumber daya yang sering menghantui PTS, serta bagaimana regulasi terbaru memberikan kerangka kerja bagi pencapaian akreditasi unggul.

Konsep *Continuous Quality Improvement* (CQI) merupakan filosofi manajemen yang berasal dari sektor industri namun telah diadopsi secara luas dalam pendidikan tinggi sebagai dasar dari manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management*). Di Indonesia,

prinsip CQI dioperasionalkan melalui siklus PPEPP, sebuah rangkaian aktivitas yang memastikan bahwa standar mutu tidak hanya ditetapkan tetapi juga ditingkatkan secara berkala.

Konsep CQI menuntut pergeseran pandangan bahwa mutu adalah sebuah destinasi statis. Sebaliknya, mutu adalah sebuah perjalanan dinamis di mana setiap kegagalan dipandang sebagai peluang untuk belajar dan setiap keberhasilan adalah standar baru yang harus dilampaui.

Tabel 1. Dimensi PPEPP dalam CQI

Dimensi PPEPP	Fokus Digitalisasi (e-SPMI)	Peran Dosen dalam CQI
Penetapan	Repositori standar digital yang dapat diakses kapan saja.	Berpartisipasi dalam perumusan standar prodi.
Pelaksanaan	Pencatatan aktivitas harian dan luaran tri dharma secara sistemik.	Pelaksana utama standar di kelas dan laboratorium.
Evaluasi	Penggunaan instrumen survei <i>online</i> dan analisis data otomatis.	Menjadi auditor internal atau pihak yang diaudit dengan jujur.
Pengendalian	Notifikasi otomatis jika capaian indikator kinerja kunci (IKU) tidak tercapai.	Melakukan refleksi pedagogis berdasarkan umpan balik data.
Peningkatan	Histori data untuk analisis tren jangka panjang dalam revisi kurikulum.	Inovator dalam metode pembelajaran baru.

Implementasi e-SPMI sering kali menghadapi hambatan bukan karena teknis sistemnya, melainkan karena persepsi penggunaanya. *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dosen terhadap teknologi baru di kampus. Dua determinan utama dalam TAM adalah *Perceived Usefulness* (Persepsi Kegunaan) dan *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sejak dikeluarkannya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, terjadi perampingan standar yang signifikan untuk memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi untuk berinovasi sesuai dengan misinya masing-masing. Perubahan ini kemudian diperkuat oleh Permendiktiesaintek No. 39 Tahun 2025 yang menekankan pada efektivitas sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Bagi PTS, mematuhi SN-Dikti adalah syarat mutlak untuk memperoleh status Terakreditasi. Namun, untuk mencapai peringkat Unggul, PTS diwajibkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk menetapkan standar yang melampaui SN-Dikti, baik dalam aspek kualitas penelitian, publikasi internasional, maupun kemitraan

industri. Inilah yang disebut sebagai Standar Dikti PT yang mencerminkan *mission differentiation* dari masing-masing institusi.

PEMBAHASAN

Implementasi e-SPMI di lingkungan PTS bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing institusional. Transformasi ini mengubah wajah penjaminan mutu yang tadinya bersifat reaktif (dilakukan menjelang akreditasi) menjadi proaktif dan berkelanjutan.

Digitalisasi penjaminan mutu melibatkan penciptaan platform yang mengintegrasikan berbagai sumber data akademik. Dalam model e-SPMI yang ideal, sistem ini terhubung secara API (*Application Programming Interface*) dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD), sistem manajemen penelitian, dan pangkalan data SDM. Ketika seorang dosen memasukkan nilai atau mengunggah sertifikat penelitian di sistem masing-masing, data tersebut secara otomatis mengalir ke modul e-SPMI untuk divalidasi sebagai pemenuhan standar tertentu.

Manfaat utama dari sistem yang terintegrasi ini adalah terciptanya *single source of truth*. Ketidaksesuaian data antara jumlah dosen tetap di PD Dikti dengan jumlah dosen yang mengajar di kelas yang sering menjadi temuan asesor akreditasi dapat dimitigasi sejak dini. Selain itu, efisiensi anggaran dapat dicapai karena pengurangan penggunaan kertas dan penghematan waktu staf administrasi dalam melakukan tabulasi data manual.

Secara strategis, e-SPMI berfungsi sebagai dasbor bagi pimpinan universitas untuk melakukan *Data-Driven Decision Making*. Misalnya, dalam evaluasi semesteran, sistem dapat menyajikan data tentang persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu per program studi dibandingkan dengan target standar. Jika data menunjukkan tren penurunan di program studi tertentu, pimpinan dapat langsung menginstruksikan audit mutu internal (AMI) yang lebih dalam atau mengalokasikan anggaran untuk bimbingan tambahan bagi mahasiswa.

Tabel 2 Komponen Tata Kelola atas Penggunaan e-SPMI

Komponen Tata Kelola	Dampak Penggunaan e-SPMI	Hasil Strategis
Transparansi	Seluruh sivitas dapat melihat capaian standar prodi secara terbuka.	Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (yayasan, orang tua).
Akuntabilitas	Setiap bukti fisik (<i>evidence</i>) memiliki jejak audit digital yang jelas.	Mempermudah verifikasi lapangan oleh asesor BAN-PT/LAM.
Efisiensi	Proses audit internal dilakukan secara paperless.	Penghematan biaya operasional institusi.
Prediktabilitas	Tren data luaran dapat diprediksi untuk perencanaan tahun depan.	Perencanaan strategis (Renstra) yang lebih akurat dan realistis.

Penggunaan e-SPMI juga mendukung implementasi *Outcome-Based Education* (OBE) yang menjadi fokus dalam instrumen akreditasi 9 kriteria. Dengan data digital, pencapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) oleh setiap mahasiswa dapat dipantau dari mata kuliah ke mata kuliah, memungkinkan perbaikan metode pengajaran secara instan jika target kompetensi tidak tercapai.

Teknologi secanggih apa pun tidak akan memberikan dampak tanpa perubahan pada manusianya. Dalam konteks penjaminan mutu, dosen sering kali menjadi titik lemah sekaligus peluang terbesar. Kurangnya keterlibatan dosen dalam sistem mutu sering kali disebabkan oleh kelelahan fungsional dan persepsi bahwa mutu adalah tugas unit penjaminan mutu (LPM) semata.

Penelitian menunjukkan bahwa resistensi dosen terhadap penjaminan mutu digital dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk :

1. Resistensi Diskursif

Dosen berargumen bahwa standarisasi melalui sistem digital akan mengancam kebebasan akademik dan otonomi mereka dalam mengajar.

2. Resistensi Perilaku

Dosen secara pasif menunda-nunda pengisian data ke dalam sistem atau memasukkan data yang tidak akurat hanya untuk memenuhi tenggat waktu.

3. Kepatuhan Ritualistik

Menggunakan sistem secara formalitas tanpa ada perubahan nyata dalam praktik pedagogis di kelas.

Akar dari resistensi ini sering kali adalah ketakutan akan perubahan dan kurangnya motivasi serta inovasi di tingkat individu. Banyak dosen merasa bahwa mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik secara tradisional dan melihat digitalisasi sebagai beban klerikal yang merendahkan martabat akademik mereka.

Strategi reskilling mindset dan skill mampu mengatasi hal ini, PTS harus menerapkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dosen yang berfokus pada *Coreskill* literasi digital. Strategi ini melibatkan: *Reskilling Mindset*, *Andragogi Learning Technology Support*, dan *Interoperability Skills*

Transformasi budaya mutu hanya akan terjadi jika dosen merasa menjadi pemilik dari sistem tersebut (*sense of ownership*). Hal ini dapat dicapai melalui desentralisasi mekanisme penjaminan mutu, di mana setiap dosen diberikan kewenangan untuk mengusulkan indikator mutu tambahan yang spesifik bagi bidang ilmunya. Dengan demikian, standar mutu tidak lagi dirasakan sebagai kontrol eksternal yang dipaksakan, melainkan sebagai standar profesional yang mereka tetapkan sendiri.

Kepemimpinan institusional memegang peran kritis dalam memfasilitasi reskilling ini. Kepemimpinan transformatif yang visioner akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi, memberikan ruang bagi kesalahan dalam proses belajar, dan secara konsisten menekankan pentingnya kualitas di setiap pertemuan. Di beberapa PTS, dukungan institusi dalam bentuk pelatihan berkala, workshop SPMI, dan audit mutu

internal (AMI) yang bersifat membimbing telah terbukti mampu menurunkan tingkat resistensi dosen.

Budaya kerja yang kuat di kampus akan memberikan arah yang jelas bagi dosen dalam menyeimbangkan kewajiban mengajar, penelitian, dan pengabdian. Sebagaimana dinyatakan dalam temuan studi kasus, budaya kerja yang didasarkan pada dukungan institusi dan target yang jelas membantu dosen merasa lebih terarah daripada merasa diawasi. Inilah esensi dari perubahan dari budaya kepatuhan menjadi budaya mutu yang otentik.

Salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi PTS di Indonesia adalah disparitas kapasitas finansial dan sumber daya manusia dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). PTS sangat bergantung pada biaya kuliah mahasiswa (UKT/SPP), sehingga setiap investasi besar dalam teknologi penjaminan mutu harus benar-benar diperhitungkan dampaknya terhadap keberlangsungan operasional.

Banyak PTS mengalami kendala infrastruktur IT yang tidak memadai untuk mendukung e-SPMI yang voluminous dan kompleks. Server yang sering *down*, koneksi internet yang lambat, dan kurangnya tenaga ahli IT yang memahami proses bisnis penjaminan mutu menjadi penghambat utama. Akibatnya, sistem e-SPMI yang dibangun sering kali tidak optimal, sulit diakses, dan akhirnya ditinggalkan oleh pengguna.

Selain infrastruktur fisik, keterbatasan anggaran juga membatasi kemampuan PTS untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi bagi dosen dan staf. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, implementasi SPMI hanya akan menjadi proses administratif yang kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan regulasi yang cepat (seperti peralihan dari instrumen 7 standar ke 9 kriteria).

Tabel 3 Jenis Tantangan Manifestasi dan Strategi Mitigasi

Jenis Tantangan	Manifestasi di PTS	Strategi Mitigasi Strategis
Finansial	Ketergantungan pada jumlah mahasiswa; anggaran IT terbatas.	Digitalisasi anggaran untuk efisiensi; mencari hibah pemerintah (seperti hibah penjaminan mutu).
Birokrasi	Struktur organisasi yang gemuk dan birokrasi yang kompleks.	Penyederhanaan SOP melalui otomatisasi e-SPMI.
Motivasi	Rendahnya insentif bagi dosen yang berfokus pada mutu.	Penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja mutu (<i>quality-based reward</i>).
Regulasi	Perubahan kebijakan nasional yang sangat cepat (SN-Dikti terbaru).	Membangun unit khusus <i>Quality Assurance</i> yang responsif terhadap kebijakan.

Untuk mengatasi dilema ini, PTS dapat menerapkan strategi manajemen risiko dan alokasi anggaran yang cerdas. Salah satu caranya adalah dengan tidak membangun sistem dari nol, melainkan mengadopsi platform *Software as a Service* (SaaS) yang sudah teruji dan terjangkau. Dengan cara ini, PTS tidak perlu menginvestasikan modal besar di

awal untuk server dan pengembangan, melainkan membayar biaya langganan yang sudah mencakup pembaruan sistem sesuai regulasi terbaru.

Selain itu, kolaborasi eksternal menjadi sangat penting. PTS dapat bergabung dalam aliansi atau konsorsium perguruan tinggi untuk berbagi praktik terbaik (*best practices*) dan bahkan berbagi sumber daya IT. Kemitraan dengan lembaga seperti LLDIKTI memberikan panduan dan fasilitas bagi PTS untuk mempercepat implementasi SPMI yang sesuai standar nasional.

Penerapan audit mutu internal (AMI) berbasis risiko juga dapat membantu PTS fokus pada area yang paling berdampak pada penurunan mutu. Alih-alih mengaudit semua aspek secara merata, PTS dapat memfokuskan sumber dayanya pada program studi yang akan diakreditasi dalam waktu dekat atau prodi yang menunjukkan indikator penurunan jumlah pendaftar. Strategi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal terhadap status akreditasi institusi.

Keberhasilan transformasi di PTS juga memerlukan pemahaman filosofis yang mendalam tentang apa itu digitalisasi mutu. Secara ontologis, digitalisasi menciptakan realitas baru di mana eksistensi institusi tercermin dalam data digitalnya di PD Dikti. Jika data digitalnya buruk, maka secara legal institusi tersebut dianggap bermutu rendah. Secara epistemologis, cara kita memvalidasi kualitas bergeser dari sekadar cerita dalam laporan evaluasi diri ke bukti data yang dapat diverifikasi secara silang oleh sistem. Secara aksiologis, digitalisasi harus membawa nilai keadilan dan transparansi, di mana setiap dosen memiliki akses yang sama untuk melihat kinerja mereka dan setiap mahasiswa mendapatkan jaminan standar layanan yang sama.

Dengan menyatukan teknologi, kapabilitas dosen, dan kepemimpinan yang adaptif, PTS dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Digitalisasi e-SPMI bukan lagi sekadar alat kepatuhan, melainkan senjata strategis untuk membangun ekosistem pendidikan yang bermutu, transparan, dan kompetitif di kancah global.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi pendidikan tinggi saat ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan mutu di tingkat fakultas dan universitas, khususnya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), tidak dapat dilakukan secara parsial atau reaktif. Digitalisasi melalui sistem e-SPMI memberikan infrastruktur fundamental untuk transparansi data dan efisiensi tata kelola, namun dosen adalah motor penggerak utama yang menentukan keberhasilan substansi dari setiap standar mutu yang ditetapkan.

Transformasi dari kepatuhan administratif yang kaku menjadi budaya mutu yang otentik hanya akan terjadi jika teknologi yang digunakan benar-benar mempermudah beban kerja dosen, memberikan manfaat nyata bagi pengembangan karier mereka, dan tidak justru menambah beban klerikal baru. Tantangan finansial dan keterbatasan infrastruktur di PTS merupakan realitas yang harus dihadapi dengan strategi alokasi sumber daya yang cerdas, kepemimpinan transformatif, dan pemanfaatan platform digital yang adaptif. Keberhasilan sinergi antara teknologi dan kapabilitas manusia ini

menjadi prasyarat mutlak bagi PTS untuk mencapai akreditasi Unggul dan menjaga daya saing di tengah dinamika perubahan regulasi nasional.

Untuk mencapai transformasi budaya mutu yang berkelanjutan, laporan ini mengajukan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi dan Yayasan disarankan untuk segera menerapkan sistem insentif dan remunerasi yang berbasis pada capaian mutu riil, bukan sekadar kehadiran administratif atau beban mengajar kuantitatif. Pimpinan harus menunjukkan komitmen politik dan finansial yang kuat terhadap digitalisasi SPMI sebagai investasi jangka panjang, bukan biaya operasional semata.
2. Bagi Dosen dan Sivitas Akademika perlu dilakukan upaya mandiri dan kolektif untuk meningkatkan literasi data agar dapat memanfaatkan hasil evaluasi mutu (seperti hasil kuesioner mahasiswa atau data publikasi) untuk perbaikan metode pengajaran dan penelitian secara mandiri. Dosen harus melihat penjaminan mutu sebagai bagian dari etika profesional dan tanggung jawab moral untuk menghasilkan lulusan yang unggul.
3. Bagi Pengembang Sistem dan Unit IT terutama di Sistem e-SPMI harus dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna (*user-friendly*) dan berorientasi pada kebutuhan pengguna akhir (*user-driven innovation*). Fitur-fitur otomatisasi data dari berbagai sumber eksternal (PD Dikti, SINTA) harus diprioritaskan untuk meminimalisir input manual dan resistensi teknis dari dosen.
4. Bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disarankan untuk mengubah pendekatan dari pemeriksa menjadi pendamping dalam proses Audit Mutu Internal (AMI). LPM harus aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif kepada unit-unit kerja untuk membangun pemahaman bersama tentang urgensi budaya mutu digital.
5. Bagi Pemerintah dan Asosiasi PTS diharapkan adanya penguatan program fasilitasi dan hibah bagi PTS berskala kecil dan menengah untuk mempercepat adopsi teknologi penjaminan mutu, sehingga kesenjangan kualitas antar perguruan tinggi di Indonesia dapat semakin diperkecil.

REFERENSI

- AlNuaimi, and others, 'Digital Transformation Strategies for Improving Quality Management', *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13.2 (2025), 215–26
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, *Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Instrumen Akreditasi 9 Kriteria* (Jakarta: BAN-PT, 2023)
- Davis, Fred D., 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology', *MIS Quarterly*, 13.3 (1989), 319–40

Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023)

Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kemendiktisaintek, 2025)

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)* (Yogyakarta: LLDIKTI, 2024)

Nuraini, and others, 'Implementasi Pengendalian Mutu dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.4 (2025), 430–45

Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, 3rd edn (London: Routledge, 2014)